



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
UNIT KERJA : DINAS PERHUBUNGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ASPA MUJI
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 438042

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.720.000.000

1. Tanah Seluas 10000 m2 di KAB / KOTA JENEPONTO, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 104 m2/80 m2 di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
3. Tanah Seluas 2000 m2 di KAB / KOTA JENEPONTO, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
4. Tanah Seluas 2150 m2 di KAB / KOTA GOWA, WARISAN Rp. 470.000.000
5. Tanah Seluas 1700 m2 di KAB / KOTA JENEPONTO, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
6. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA JENEPONTO, LAINNYA Rp. 170.000.000
7. Tanah Seluas 1836 m2 di KAB / KOTA JENEPONTO, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 101 m2/30 m2 di KAB / KOTA JENEPONTO, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 100.000.000

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA G AT Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 27.410.947



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.847.410.947
III. HUTANG	Rp.	56.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.791.410.947

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.